Yogyakarta, 9 Juli 1960.

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta).

Seri A Nomor 10.
Tahun 1960.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 13 TAHUN 1959. (13/1959)

Tentang : Pemberian tunjangan kematian.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca : Surat Dewan Pemerintah Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
tertanggal 14 Januari 1959 Nomor 329/II/A/1959;

Menimbang : 1.bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 15
Nopember 1951 Nomor A. 55-5-49/U.2.26 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Surat Keputusan tanggal 29 Mei 1953 No. A 70-10-53/Aw-53-6 tentang
"peraturan tunjangan kematian" hanya berlaku untuk pegawai Negeri;
2.bahwa memandang perlu bagi pegawai Daerah Istimewa
Yogyakarta diadakan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala
Kantor Urusan Pegawai tersebut diatas.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah
dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958;
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3.Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai Nomor A. 55-5-
49/U.2.26 tertanggal 15 Nopember 1951 jo. Nomor A.70-10-38/Aw.53-6 tertanggal 29
Mei 1953

Mendengar :Pembicaraan-pembicaraan didalam rapatnya pada tanggal 21 Juli 1959.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemberian
tunjangan kematian",

sebagai berikut :

Pasal 1.

Untuk berlakunya Peraturan Daerah ini, maka yang dimaksudkan dengan:

(1). Pegawai Daerah ialah :

1.mereka, baik laki-laki maupun perempuan, yang diangkat tetap atau untuk sementara oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Dewan Pemerintah Daerah, dengan surat Keputusan untuk memangku suatu jabatan Pemerintah Daerah dan diberi gaji yang diberatkan pada anggaran belanja Pemerintah Daerah untuk pegawai Daerah, termasuk mereka yang telah diberikan uang tunggu atau gaji istirahat menurut peraturan-peraturan yang berlaku.

2.mereka, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak termasuk dalam ketentuan angka 1 diatas, akan tetapi bekerja pada jabatan Pemerintah Daerah sebagai pekerja lepas dengan mendapat upah bulanan/harian, jika untuk mereka tidak berlaku peraturan lain;

3.bekas pegawai Daerah menurut ketentuan-ketentuan angka 1 di atas yang menerima pensiun menurut peraturan-peraturan yang berlaku.

(2).Janda, ialah mereka baik laki-laki maupun perempuan, yang bersuami/isteri secara sah dengan pegawai Daerah itu;

(3).Gaji bulanan, ialah pokok gaji (termasuk gaji tambahan peralihan c.q tambahan yang sama sifatnya), uang tunggu atau gaji istirahat serta pokok pensiun, ditambah dengan tunjangan kemahalan daerah, tunjangan anak dan tunjangan lain-lain menurut peraturan-peraturan yang berlaku;

(4)Anak, ialah anak pegawai Daerah yang bersangkutan yang dapat diberikan tunjangan anak menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 2.

Apabila seorang pegawai Daerah meninggal dunia, maka gajinya dibayarkan sampai dengan bulan ia meninggal.

Pasal 3.

(1).Kepada janda pegawai Daerah, disamping gaji yang dimaksudkan dalam pasal 2, diberikan uang tunjangan-kematian sebanyak satu setengah kali gaji bulanan yang menjadi haknya pada saat pegawai Daerah itu meninggal dunia;

(2).Apabila seorang pegawai Daerah meninggal dunia dalam dan karena melakukan pekerjaan jabatannya, maka tunjangan kematian itu berjumlah tiga kali gaji bulanan yang menjadi haknya pada waktu pegawai Daerah yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 4.

(1).Apabila pegawai Daerah yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan janda, maka pembayaran gaji serta tunjangan kematian dilakukan untuk anak-anaknya;

(2).Apabila anak-anak termaksud dalam ayat (1) diatas ini tidak

ada maka pembayaran gaji serta tunjangan kematian itu dilakukan untuk sanak-saudara lainnya yang menjadi tanggungannya dengan tingkat urutan menurut hukum yang berlaku.

Pasal 5.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan DAerah ini dan hal-hal yang walaupun sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, akan tetapi bersifat luar biasa, sehingga pelaksanaannya dapat menimbulkan keragu-raguan dan/atau ketidak-adilan, diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah berdasarkan alasan-alasan yang kuat.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Desember 1951, kecuali mengenai ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 1 ayat (1) angka 3 berlaku surut sampai dengan tanggal 21 Oktober 1952.

Yogyakarta, 21 Juli 1959.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd

SISWOSUMARTO

Berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 9 Juli 1960.

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 10 Tahun 1960).

Kepala Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

ttd

HAMENGKU BUWONO IX.

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan dari Penguasa Perang Daerah Jawa Tengah/Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Mei 1960 No. KPTS.-PPD./00151/5/1960.

Sekretaris Daerah I, Daerah

Istimewa Yogyakarta.

ttd.

LABANINGRAT.